

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN LUNANG TAHUN 2026

**RENCANA KERJA (RENJA)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KECAMATAN LUNANG
TAHUN 2026**



**KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas limpahan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas-tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap SKPD termasuk Kecamatan Lunang.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.



Lunang, 15 September 2025
PIH. KAMAT LUNANG,

SYAMWIL, S.STP., M.M.

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 198201132001121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
 LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun	
2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lunang.....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 34
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lunang.....	34
3.3 Program dan Kegiatan	40
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 49
BAB V PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Pesisir selatan	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan	20
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan	26
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026	40
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	44
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

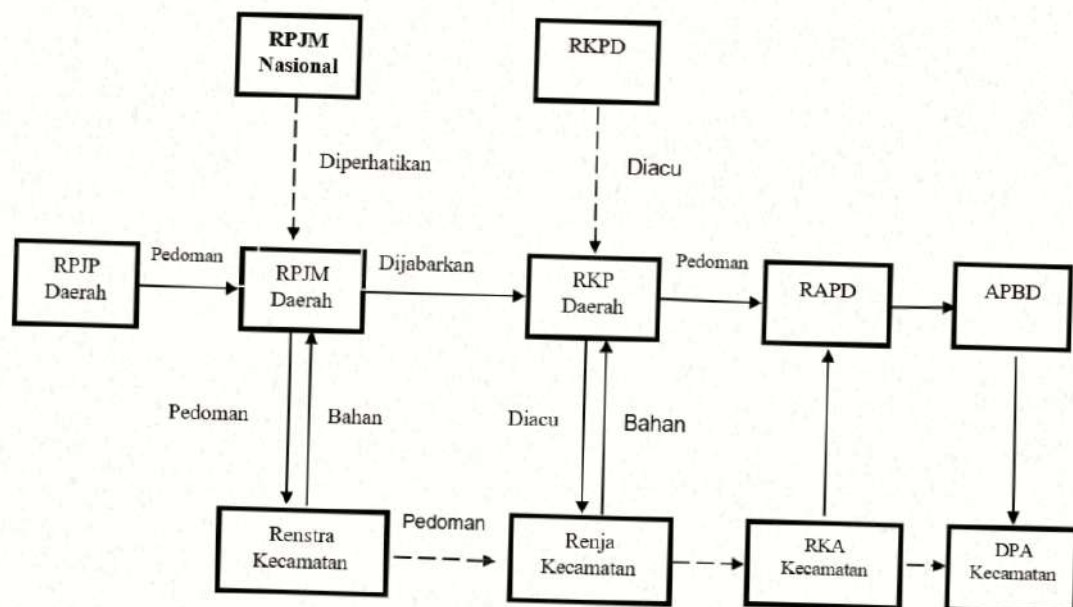
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Pesisir selatan dan berorientasi pada hasil yang

akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026. Hasil perumusan Rencana Kerja disajikan dengan sistematika yang meliputi: pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja pendanaan dan penutup.

Renja Kecamatan Lunang Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Lunang Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1: Tahapan Penyusunan Renja Kecamatan Lunang Tahun 2026



Renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja Tahunan Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan mencakup :

1. Penyusunan rancangan Keputusan Camat Lunang tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Tahunan;
2. Orientasi mengenai Renja Tahunan;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun renja tahunan.

b. Pengolahan data dan informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, yang menyangkut aspek :

1. Kondisi pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Organisasi dan Tataaksana Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya;
4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
9. Rancangan awal RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
10. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
11. Data Pokok Pembangunan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan; dan
12. Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
3. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024, dan perkiraan realisasi tahun 2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
 5. Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya berdasarkan Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;**

Adapun review hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
2. Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten

Pesisir Selatan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

e. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dan mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal);
4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan; dan
6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

f. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah :

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

g. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

h. Pengukuran kinerja tujuan dan sasaran;

Pengukuran Kinerja (Performance Measurement) tujuan dan sasaran bertujuan untuk menilai kemajuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

i. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, namun dalam proses ini Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

j. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk

memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dalam pembangunan daerah.

k. Penyajian awal dokumen renja Perangkat Daerah;

Penyusunan dokumen renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

l. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

m. Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah;

Penyempurnaan renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

n. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan saran dan masukan dari tim desk renja Perangkat Daerah.

o. Penyesuaian dokumen renja Perangkat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun tentang Rencana Strategis Kecamatan Lunang Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Kecamatan Lunang ke dalam rencana kerja tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2026;
3. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2026;
5. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

5.1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pada bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Kecamatan Lunang, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Daerah serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Senilai Rp 1.992.737.013,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga belas rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.785.904.611,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu enam ratus sebelas rupiah.).

Untuk menilai kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi kategori sangat tinggi dengan capaian berkisar antara lebih dari 90 sampai dengan 100 persen, tinggi dengan capaian lebih dari 75 sampai dengan 90 persen, sedang dengan capaian lebih dari 65 sampai dengan 75 persen, rendah dengan capaian antara 50 sampai dengan 65 persen, serta sangat rendah dengan capaian di bawah 50 persen.

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja Tahun 2024, terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan status capaian sangat tinggi, 1 (satu) kegiatan dengan status capaian tinggi, 2 (dua) kegiatan dengan capaian sedang, 2 (dua) kegiatan dengan status capaian sangat rendah. Untuk capaian kinerja keluaran (output), seluruh kegiatan telah tercapai sesuai dengan perencanaan.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 terlihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/) (Output)	Target Kinerja Renstra Kec. Lintang pada Periode Tahun 2021 s.d 2026		Capaian Kinerja Renstra Kec. Lintang, Sampai Dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Kec. Lintang Per Triwulan Tahun Anggaran 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kec. Lintang s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Kec Lintang s/d Tahun 2025 (%)							
				5		6		7		8				9				10				11		12		13		14	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	Memingkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lintang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	8.964.796.565	60	4.525.231.629	20	1.534.698.748	5	424.426.934	5	434.707.974			10	895.134.908	70	5.384.366.533	70,00	68,13								
		Pencapaian, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kantor	100	75.000.000	57	24.253.000	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	24.253.000	57,00	32,34								
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersedia (dokumen)	35	75.000.000	44	24.253.000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	24.253.000	51,76	32,34								
		Administrasi Keuangan	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor	100	6.878.795.565	80	3.541.060.004	20	1.297.787.088	8	320.805.882	8	304.889.729			14	685.695.591	74	4.226.785.645	74,00	63,29								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan (bulan)	70	6.450.722.565	42	3.420.156.151	14	1.343.622.068	3	315.925.882	5	352.419.729			8	663.945.591	59	4.082.184.743	71,43	63,44								
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan (bulan)	80	228.000.000	39	114.920.920	12	54.165.000	3	7.280.000	3	12.470.000			6	19.758.000	42	134.680.963	70,00	59,37								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Kantor	100	1.478.000.000	60	619.779.283	20	203.243.432	15	68.198.200	9	42.185.280			24	111.353.480	84	731.132.763	84,00	49,53								
		Penyediaan Komponen Modal Lainnya/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen modal lain/penerangan (bulan)	80	65.000.000	33	7.058.800	12	1.761.504	3	261.800	-	-			3	261.800	36	7.929.600	60,00	12,20								
		Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10	100.000.000	4	82.954.000	4	32.967.440	3	12.805.000	-	-			3	12.805.000	7	75.489.000	70,00	75,50								
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	50	180.000.000	33	57.261.800	12	20.608.850	3	2.851.800	3	2.803.000			6	7.604.800	39	64.968.300	65,00	36,10								
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan	Jumlah barang cetak dan pengemasan yang disediakan (jenis)	80	75.000.000	34	22.586.100	12	8.313.300	3	1.127.200	3	892.500			6	1.819.700	40	24.415.800	66,67	32,55								
		Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perangai-Undangan	Jumlah bahan baku dan perlengkapan undangan yang disediakan (bulan)	80	8.600.500	24	1.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	24	1.200.000	40,00	39,69								
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu (bulan)	50	200.000.000	27	882.400	-	-	-	-	-	-			-	-	27	882.400	45,00	0,43								
		Penyempurnaan Raper Koordinasi dan Konsultasi RKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi (dokumen)	60	850.000.000	36	487.406.383	12	141.294.338	3	51.143.500	3	37.688.780			6	88.833.280	42	555.239.843	70,00	65,44								

		Penyediaan Jasa penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Persentase temennya Jasa Penunjang Usulan Kantor	100	350.000.000	51	195.189.068	20	61.260.000	6	14.152.872	6	10.732.905					12	24.889.837	73	181.053.925	73,00	51,73
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah bulan teguhan air (PDAM, PLN, internet, telfon, dll yang dibayarkan bulanan)	80	50.000.000	38	18.201.612	12	12.800.000	3	2.152.872	3	2.102.077					6	4.254.949	42	22.586.761	70,00	45,17
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan bulanan)	90	300.000.000	38	137.436.276	12	48.080.000	3	12.000.000	3	8.630.888					6	20.630.088	42	158.467.164	70,00	52,82
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Usulan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Kantor	100	375.000.000	55	193.941.200	20	72.318.231	5	20.300.000	-	18.900.000					5	37.280.000	40	221.141.200	60,00	58,97
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pagalnya (unit)	2	150.000.000	2	94.229.200	2	28.719.231	2	12.550.000	8.900.000					2	19.450.000	2	113.679.200	100,0	75,70	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara (paket)	40	80.000.000	24	5.080.000	3	1.400.000	2	2.780.000	-					2	2.700.000	26	7.800.000	43,33	13,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi (unit)	2	185.000.000	2	34.992.000	2	38.206.000	1	5.000.000	10.500.000					1	15.000.000	2	99.662.000	100,0	60,40	
2	Meningkatnya persentase warga dalam menjaga lingkungan sekitar rumah	PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang ditangani	100	275.000.000	40	51.833.850	0	6.468.000	1	6.468.000	-	-				1	6.468.000	41	58.301.850	41,00	21,20	
		Pelaksanaan Usulan Pemerintahan yang Dimplokan kepada Camat	Persentase terlaksananya kegiatan usulan pemerintahan yang diplokan kepada Camat	100	275.000.000	40	51.833.850	0	6.468.000	1	6.468.000	-	-				1	6.468.000	41	58.301.850	41,00	21,20	
		Pelaksanaan Usulan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang diplokan kepada Camat	Jumlah kegiatan usulan pemerintahan yang terkait kewenangan lain yang diplokan kepada Camat yang terlaksana	3	275.000.000	3	51.833.850	2	6.468.000	1	6.468.000	-	-				1	6.468.000	4	58.301.850	133,3	21,20	
3	Meningkatnya FORD Sektor Unggulan	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	400.000.000	57	147.583.000	26	26.681.500	10	5.150.000	1	1.557.500				11	6.707.500	66	124.389.500	66,00	31,10	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	300.000.000	55	102.355.000	20	26.681.500	10	5.150.000	1	1.557.500				11	6.707.500	66	105.062.500	66,00	36,35	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Musdes)	10	100.000.000	10	17.600.000	10	5.150.000	10	5.150.000	-				10	5.150.000	10	22.840.000	100	22,84		
		Peningkatan Kualitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Desa/RT	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang di bina	25	200.000.000	6	64.665.000	7	23.331.500	-		1	1.557.500				1	1.557.500	7	86.222.500	28,00	43,11	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	100.000.000	20	15.328.000	20	-	-	-	-				-	-	20	15.328.000	20,00	15,33		
		Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diawakibatkan	14	100.000.000	2	15.328.000	-	-	-	-	-				-	-	2	15.328.000	14,29	15,33		

4	Meningkatnya partisipasi warga dalam mengelola lingkungan secara mandiri	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	296.000.000	65	63.642.500	20	39.127.000	-	-	3	600.000					3	600.000	88	84.242.500	68,00	29,00
		Pembiayaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	100	296.000.000	60	63.642.500	20	39.127.000	-	-	3	600.000					3	600.000	83	84.242.500	63,00	29,05
		Pembinaan Restorasi dan Kasutan Bangas	Jumlah Pelaksanaan RABIS (kal)	5	190.000.000	3	11.292.500	1	34.580.000	-	-									3	11.292.500	60,00	37,62
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (bulan)	Jumlah Kegiatan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (bulan)	60	100.000.000	36	12.350.000	12	4.537.000	-	-	3	800.000					3	800.000	18	12.350.000	60,00	12,86
5	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TATA PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembiayaan dan pelaksanaan pemerintahan desa	100	35.000.000	20	7.850.000	0		0	0									20	7.850.000	20,00	8,36
		Facilitas, rekomendasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya Fasilitas, rekomendasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Pengawasan Pemerintahan di tingkat	100	95.000.000	20	7.850.000	0		0	0									20	7.850.000	20,00	8,36
		Facilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pengalangan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik (nagari)	10	95.000.000	10	7.850.000	0		0	0									10	7.850.000	100	8,36
JUMLAH				500	10.014.795.965	242	4.798.240.975	60	1.708.885.240	16	430.044.934							15	872.910.408	257	5.655.151.383	51,40	94,51
Rate-Rate Capaian Kinerja (%)																					61,40	29,30	
Peningkat Kinerja																					R	SR	

Sumber Data : Dealev Kecamatan Lunang Triwulan II Tahun 2025

Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - e. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
2. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Selanjutnya dilakukan penelaahan terhadap faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut, analisis terhadap implikasi atau dampak yang ditimbulkan terhadap pencapaian target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Lunang, serta perumusan kebijakan atau langkah-langkah perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau Job Performance dari suatu organisasi yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi dan misi tertentu.

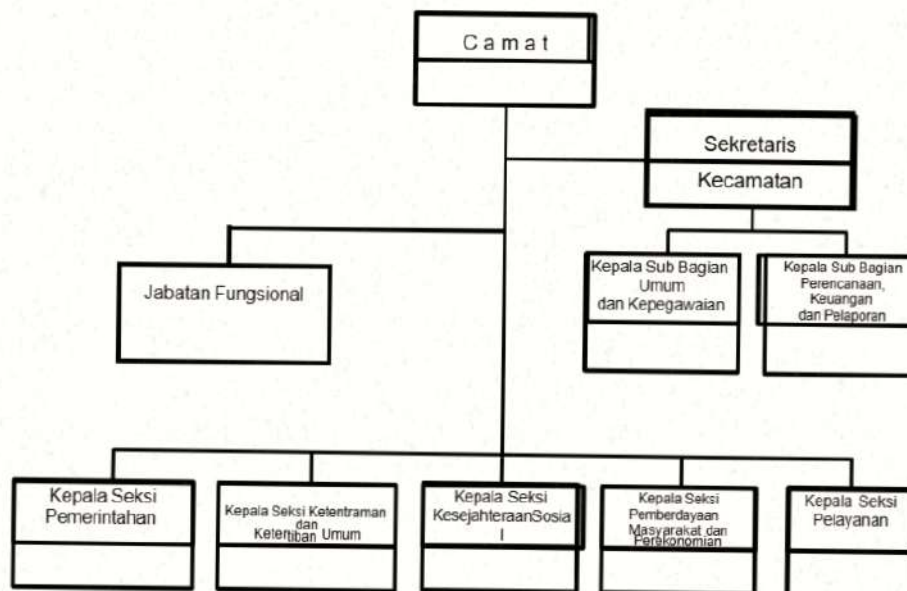
Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja dan Analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diamanatkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani unsur kewilayahan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Nagari;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.



Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Camat;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;

- g. Seksi Pelayanan;
- h. Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

A. Kinerja pelayanan di bidang Pemerintahan

1. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat Nagari dan kampung
2. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh Nagari bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait.
3. Memberikan arahan kepada pemerintahan Nagari untuk membuat peraturan Nagari sebagai payung hukum di tingkat Nagari.
4. Memberikan pembinaan kepada penambangan galian C.
5. Melakukan pembinaan dalam peningkatan PBB.
6. Kerjasama wilayah perbatasan
7. Penataan pelayanan public dan terpadu di Kecamatan (satu) pintu.
8. Pelaksanaan apel gabungan di kecamatan
9. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti diklat,kursus dalam peningkatan sumber daya aparatur Kecamatan dan Nagari
10. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan dinas instansi terkait di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
11. Pembinaan kelengkapan administrasi Nagari dan pendampingan dalam membuat APB-Nagari.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan dengan memfasilitasi, membina, dan memantau kegiatan peningkatan infrastruktur yang berbasis masyarakat (Kemitraan, swadaya murni, UPK, dan lain-lain)
2. Memfasilitasi,membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan.

3. Fasilitasi peningkatan produk unggulan Nagari
4. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan.
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta kesehatan.
6. Pembinaan kelompok simpan pinjam dan Program UPK.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin)
2. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah
3. Pelaksanaan Peringatan hari-hari besar Keagamaan
4. Pelaksanaan Peringatan hari Bakti Transmigrasi
5. Monitoring penyaluran Jamkesmas dan Jamkesda
6. Membantu penanganan masalah sosial dan bencana alam
7. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait dengan kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan
4. Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik
5. Angka Kemiskinan Ekstrim
6. Prevalensi Stunting (Eppgbm)
7. Persentase Konflik yang Diselesaikan

Berikut dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lunang
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	BB (79,2)	BB (79,2)	BB (79,5)	BB (79,2)	B (63,72)	N/A	BB (79,5)	BB (79,2)	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	85	87	87	88	85,45	N/A	87	88	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan			75	75	78	80	51	94	78	80	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
4	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	-	-	75%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
5	Angka Kemiskinan Ekstrem	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0%	0%	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
6	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	-	-	2,51%	5,00%	5,00%	4,80%	4,88%	N/A	5,00%	4,80%	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
7	Persentase Konflik yang Diselesaikan	-	-	80%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target

Sumber Data: Kecamatan Lunang

Berdasarkan data Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025, realisasi capaian kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 yang dikeluarkan pada tahun 2025 adalah B (63,72), atau tercapai 80,45%. Untuk Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Lunang pada tahun 2025 dengan target 75 dan terealisasi 94 atau tercapai 125,33%.

Untuk capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrem, Prevalensi Stunting (Eppgbm), Persentase Konflik yang Diselesaikan akan dilakukan pengukuran di Triwulan IV Tahun 2025.

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan masih berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja untuk tahun-tahun mendatang..

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah :

a. Kecamatan

Permasalahan Kecamatan Lunang dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya atau belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, yang disebabkan:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai;
2. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
4. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi Perkantoran;

5. Perencanaan program dan kegiatan yang belum tepat sasaran sehingga belum terwujudnya pemerintahan yang good governance

Adapun Permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Lunang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Seksi Pemerintahan

- a. Urusan Pencapaian Target PBB-P2 memiliki permasalahan:
 1. Masih banyaknya masyarakat yang tidak membayar PBB-P2.
 2. Keberadaan wajib pajak tidak diketahui keberadaannya. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dalam meningkatkan pelayanan wajib pajak.
 - b. Peraturan Nagari, masalahnya:

Masih rendahnya kepedulian Nagari dalam merumuskan dan membuat peraturan Nagari sebagai payung hukum bagi nagari dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada pemerintahan Nagari tentang pedoman pembuatan peraturan Nagari.
 - c. Masih perlu ditingkatkannya kesadaran Masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
 - d. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
 - e. Kurangnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha;
- Upaya yang telah dilakukan adalah :
1. Mengadakan Sosialisasi secara berkala berkaitan dengan Ketentraman Ketertiban dan Keamanan Wilayah;

2. Meningkatkan kesadaran hukum tentang hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha;

2. Seksi Ekonomi Pembangunan

Bidang ekonomi pembangunan di Kecamatan Lunang pada umumnya berjalan baik, tetapi di bidang perkoperasian perlu peningkatan pemahaman tentang administrasi.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi bidang pembangunan sehingga memaksimalkan kegiatan pembangunan tersebut.

3. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan
- b. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Keluarga masih dirasakurang
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi ikut serta mensukseskan pembangunan yang ada di wilayah mereka.

Upaya yang dilakukan adalah

- a. Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah.
- b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Wali Nagari untuk memaksimalkan peran kader dan institusi Masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaiantarget Keluarga Berencana.

2) Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional

Dalam satu kerangka pembangunan nasional yang terintegrasi, Rancangan awal RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan telah dipaduselaraskan dan diharmonisasikan dengan visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2021-2024 serta visi dan misi gubernur Sumatera Barat dalam rancangan RPJMD Sumbar Tahun 2025-2029.

Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2025-2029 berdampak terhadap capaian program nasional yaitu memajukan kehidupan masyarakat dari semua sektor, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pariwisata. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalian sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lunang

Tantangan

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas Pemerintahan.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Peluang

1. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah serta pelayanan publik.
2. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi Kecamatan.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Lunang Tahun 2026 terhadap kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.3
Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lunang

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Lunang	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.616.454.154	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Lunang	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	1	1.679.714.154	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	1.700.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	1	21.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5.325.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1.200.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	15.675.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	1.288.354.154	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	1	1.288.354.154	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lunang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	1.234.189.154	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lunang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	1.234.189.154	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	54.165.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	54.165.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	219.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	219.600.000	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	500.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	1.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	1.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	11.800.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	15.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Lunang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	2.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Lunang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	2.000.000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	400.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	1.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	200.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	14.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	14.000.000	
Pengadaan Mebel	Kecamatan Lunang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	5.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Lunang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	5.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	9.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	9.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	52.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	64.000.000	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	4.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	15.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	48.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	49.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	44.700.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	1	72.860.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Lunang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	38.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Lunang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	38.700.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	2.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	2.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	4.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	32.160.000	
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Lunang	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	85%	2.500.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Lunang	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	0,85	41.500.000	
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lunang	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	2.500.000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lunang	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1	41.500.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	2.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	41.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Lunang	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100%	4.500.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Lunang	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1	40.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Lunang	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan	100%	4.500.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Lunang	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan	1	40.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	4.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	5.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	35.000.000	
4	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lunang	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100%	1.000.000	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lunang	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1	10.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lunang	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100%	1.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lunang	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1	10.000.000	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	5.000.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	500.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	5.000.000	
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Lunang	Persentase penurunan potensi konflik	100%	6.020.070	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Lunang	Persentase penurunan potensi konflik	1	38.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	6.020.070	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	1	38.000.000	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Lunang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100	4.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Lunang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100	35.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	2.020.070	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	3.000.000	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Lunang	Persentase administrasi keuangan dan pemerintahan nagari yang dilaksanakan sesuai standar	100%	1.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Lunang	Persentase administrasi keuangan dan pemerintahan nagari yang dilaksanakan sesuai standar	1	10.000.000	

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah pemerintahan Desa/Nagari yang dibina dan diawasi	10	1.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah pemerintahan Desa/Nagari yang dibina dan diawasi	10	10.000.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	1.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	10.000.000	
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0		Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0	0	
JUMLAH				1.630.474.224	JUMLAH				1.809.214.154	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Kecamatan Lunang. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Lunang berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2026 dari Para Pemangku Kepentingan pada saat musrenbang tingkat Kecamatan Lunang Tahun 2025 adalah sebagai tabel 2.4. berikut:

Tabel T-C 32 Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kebupaten Pesisir Selatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Lunang

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	VOLUME	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	CATATAN VERIFIKASI	REKOMENDASI (LAYAK/TIDAK LAYAK)	NILAI (50-100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tergenangnya halaman Sekolah saat hujan turun.	Penanggulangan Banjir di SDN 01 Rantau Ketaka	Guru/Siswa	1 Paket	50.000.000	Dinas Pendidikan	Buatkan DED/RAB kegiatannya	Layak	75
2	Masih kurangnya minat baca di tingkat masyarakat	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Masyarakat	1 Paket	100.000.000	Dinas Kearsipan dan Pustaka	Lengkapi dengan Proposal kegiatan	Layak	75
3	Hasil Pertanian/Perkebunan Masyarakat dibawa menyeberangi sungai menuju rumah.	Pembangunan Jembatan Gantung Menuju Lahan Pertanian	Masyarakat, Kelompok Tani	1 Unit	500.000.000	Dinas PUPR	Buatkan DED/RAB kegiatannya	Layak	80
4	Memperlancar akses masuk untuk aktivitas RMP	Rabat Beton Jalan RMP.	Kelancaran RMP	250 M	250.000.000	Dinas PUPR	Buatkan DED/RAB kegiatannya	Layak	80
5	Terjadi banjir di pemukiman masyarakat Nagari Lunang Barat akibat debit air Sungai Batang Lunang tinggi disaat curah hujan tinggi.	Perbaikan Tanggul Sungai Batang Lunang	Masyarakat	500 M	250.000.000	Dinas PUPR	Koordinasi dengan dinas terkait	Layak	85
6	Belum terdapat ruang pertemuan yang memadai untuk acara pertemuan tingkat kecamatan dan juga sebagai tempat ruang pajang hasil UMKM masyarakat Lunang.	UDKP Kecamatan Lunang	Masyarakat	1 Paket	800.000.000	Dinas PUPR	Koordinasi dengan dinas terkait	Layak	85

Sumber Data : Musrenbang Kecamatan Lunang Tahun 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sehubungan dengan pelaksanaan Nawacita dimana pelaksanaan pembangunan dari pinggir Kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa/Nagari sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam mewujudkan pembangunan Desa/Nagari, tujuan/indikator yang bisa ditetapkan Kecamatan Lunang adalah:

1. Mengoptimalkan fungsi fasilitasi Pembinaan produk unggul nagari dan pemberdayaan masyarakat
2. Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (pembangunan kawasan pedesaan berbasis ternak sapi bali).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 mengacu pada visi dan misi Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan serta selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 adalah:

"PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN"

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut: Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) **Maju:** Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- b) **Tumbuh:** Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
- c) **Berkelanjutan:** Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”**. Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Profesionalisme dan integritas menjadi dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan baik, menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Pemerintahan yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme dalam pemerintahan mencerminkan tata kelola yang berbasis kompetensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, integritas menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bebas dari korupsi. Misi ini bertujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, mengedepankan nilai-nilai etika, serta senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan adanya sistem yang berorientasi pada kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Komitmen terhadap integritas juga menjadi landasan dalam misi ini, dengan menanamkan budaya anti-korupsi serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Dengan demikian, pemerintahan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
- **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”**. Misi "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" merupakan wujud dari komitmen untuk membangun bangsa yang tangguh, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Misi ini bertujuan untuk menciptakan individu-individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga berkarakter kuat,

adaptif terhadap perubahan, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Langkah untuk mewujudkan misi ini meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan sistem pelatihan vokasi, serta pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. Selain itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kerja keras, dan semangat inovasi sejak dini agar tercipta generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui misi ini, kita berharap terbangunnya generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menciptakan peluang kerja; generasi yang bukan hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam kemajuan bangsa.

- **“Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera”.** Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan lanskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan

diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.

- **“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif”**. Perwujudan misi ini merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan bersatu. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat. Program yang mendorong interaksi sosial yang positif, dialog antar komunitas, serta pelestarian budaya lokal yang inklusif akan terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua, akan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.
- **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana”**. Pesisir Selatan Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan lingkungan, namun juga memiliki tantangan besar terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Mengacu kepada Visi, Misi serta Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan adalah: Misi ke 1 (Satu) yaitu: **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”**,

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 maka tujuan yang hendak dicapai yaitu:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi.”

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur. Sasaran yang hendak dicapai dalam peningkatan pelayanan publik tahun 2026 yaitu:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
 - b. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.
 - c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
 - d. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan
- Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (79,2)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	75
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	100%
			Angka Kemiskinan Ekstrem	0%
			Prevalensi Stunting (Eppgbm)	5,00%
2.	Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenang dan Dinamis.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	100%

3.3. Program Dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dalam Renja 2026 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2026:

Jumlah Program : 6 (enam)
 Jumlah Kegiatan : 11 (sebelas)
 Jumlah Sub Kegiatan : 27 (dua puluh tujuh)

Pagu Indikatif APBD : Rp 1.908.360.039,- (*Satu miliar sembilan ratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu tiga puluh sembilan rupiah*).

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Fasilitas Kunjungan Tamu.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik:

Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

IV. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sub Kegiatan:

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
2. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

VI. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa:

Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
2. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.33. Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

No	Rancangan Awal Renja Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Lunang	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	100%	1.780.920.039	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Lunang	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	100%	1.805.585.039	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Bulan	5.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Bulan	5.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 dokumen	2.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	3.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya administrasi keuangan kantor	12 bulan	1.310.189.154	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya administrasi keuangan kantor	12 bulan	1.324.354.154	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lunang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	1.258.189.154	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lunang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	1.270.189.154	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Lunang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	52.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Lunang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	54.165.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya administrasi umum kantor	12 bulan	323.830.885	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya administrasi umum kantor	12 bulan	333.830.885	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	1.080.585	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	1.080.585
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	50.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	15.240.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	15.240.300
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Lunang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	4.510.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Lunang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	4.510.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	3.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	3.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	250.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	40.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	40.000.000
Pengadaan Mebel	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Pengadaan Mebel	1 Laporan	20.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Pengadaan Mebel	1 Laporan	20.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin	1 Laporan	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin	1 Laporan	20.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	62.700.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	62.700.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	12.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	12.600.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	50.100.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	50.100.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	79.200.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	79.200.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Lunang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	38.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Lunang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	38.700.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 unit	8.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 unit	9.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	32.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	32.000.000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Lunang	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kecamatan	85%	23.500.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Lunang	85%	85%	23.500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lunang	Terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	12 bulan	23.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lunang	Terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	12 bulan	23.500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Lunang	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	1 Kegiatan	1.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Lunang	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	1 Kegiatan	1.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Lunang	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan	22.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Lunang	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan	22.500.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Lunang	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	100 %	31.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Lunang	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	100 %	31.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Lunang	Terwujudnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	12 bulan	31.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Lunang	Terwujudnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	12 bulan	31.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang kecamatan sesuai dengan prioritas	50 usulan	6.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	50 usulan	6.000.000	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan	25.000.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan	25.000.000	

4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lunang	Persentase Kegiatan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana	100%	10.000.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lunang	Persentase Kegiatan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana	100%	20.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lunang	Terwujudnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	12 bulan	10.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lunang	Terwujudnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	12 bulan	20.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	5.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	5.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	10.000.000	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Lunang	Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	40.940.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Lunang	Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	41.590.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 bulan	40.940.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 bulan	41.590.000	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Lunang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	30 orang	34.590.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Lunang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	30 orang	34.590.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen	6.350.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen	7.000.000	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lunang	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	22.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lunang	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	32.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lunang	Terwujudnya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 bulan	22.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lunang	Terwujudnya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 bulan	32.000.000	

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik Jumlah Penetapan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi	10 Nagari	20.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik Jumlah Penetapan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi	10 Nagari	30.000.000
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Lunang	Jumlah Penetapan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi	1 Kecamatan	2.000.000	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Lunang	Jumlah Penetapan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi	1 Kecamatan	2.000.000
Jumlah				1.908.350.039	Jumlah				1.953.675.039

Sumber : Kecamatan Lunan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Lunang kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Lunang. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Tabel TC-27

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Kegiatan Output)	Data Pencapaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	20	21
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (%)		100	1.780.920.039	Kec. Lunang	
			7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)		100	5.000.000	Kec. Lunang	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)		2	2.000.000	Kec. Lunang	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)		6	3.000.000	Kec. Lunang	

7	01	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)	100	1.310.189.154	Kec. Lunang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	12	1.258.189.154	Kec. Lunang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	52.000.000	Kec. Lunang	
7	01	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	323.830.885	Kec. Lunang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	10	1.080.585	Kec. Lunang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	50.000.000	Kec. Lunang	

				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)		12	15.240.300	Kec. Lunang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		2	4.510.000	Kec. Lunang	
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)		2	3.000.000	Kec. Lunang	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		12	250.000.000	Kec. Lunang	
7	01	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		100	40.000.000	Kec. Lunang	

				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Disediakan (unit)	2	20.000.000	Kec. Lunang	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	2	20.000.000	Kec. Lunang	
7	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	62.700.000	Kec. Lunang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	3	12.600.000	Kec. Lunang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	4	50.100.000	Kec. Lunang	

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	7	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%)	100	79.200.000	Kec. Lunang	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	2	38.700.000	Kec. Lunang	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	8	8.500.000	Kec. Lunang	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2	32.000.000	Kec. Lunang	
		7	01	02		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	85%	23.500.000	Kec. Lunang	

			7	01	02	2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%)	70	23.500.000	Kec. Lunang	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan)		1.000.000	Kec. Lunang	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)		22.500.000	Kec. Lunang	
			7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik (Nagari)	10	22.000.000	Kec. Lunang	
			7	01	06	2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)	10	22.000.000	Kec. Lunang	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik											

					Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)	2	20.000.000	Kec. Lunang		
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Prevalensi Stunting (Eppgbm)			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (dokumen)	2	2.000.000	Kec. Lunang		
			7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan (%)	100	31.000.000	Kec. Lunang	
			7	01	03	2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan (%)	100	31.000.000	Kec. Lunang	
						Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)	6	6.000.000	Kec. Lunang	

						Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)		2	25.000.000	Kec. Lunang	
Terciptanya kondisi masyarakat pesisir selatan yang aman, tenteram dan dinamis	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	7	01	05	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		100%	10.000.000	Kec. Lunang	
			7	01	05	2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)		800%	10.000.000	Kec. Lunang	
						Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)		2	5.000.000	Kec. Lunang	

					Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)	2	5.000.000	Kec. Lunang	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum (%)	80	40.940.000	Kec. Lunang	
7	01	05	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (%)	80	40.940.000	Kec. Lunang	
					Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)	100	34.590.000	Kec. Lunang	
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen)	4	6.350.000	Kec. Lunang	
JUMLAH								1.908.360.039		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2025–2029. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2026.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD adalah sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Pesisir Selatan.